

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

4.1 Kota Bengkulu

4.1.1 Letak Geografis dan Iklim

Kota Bengkulu merupakan Ibu Kota Propinsi Bengkulu yang memiliki luas 151.7 KM² menurut hasil survey terakhir Bakosurtanal. Kota Bengkulu terletak di posisi Barat Pulau Sumatera berada diantara 30 45” – 30 59” Lintang Selatan serta 102022” Bujur Timur. Kota Bengkulu memiliki relief permukaan tanah yang bergelombang , terdiri dari daratan pantai dan daerah bukit-bukit serta di beberapa tempat terdapat cekungan alur sungai kecil.

Kota Bengkulu di sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Kabupaten Seluma dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Curah hujan pada tahun 2009 lebih rendah dibanding dengan tahun 2010. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Oktober, Maret dan Februari. Sedang jumlah hujan tertinggi yaitu selama 27 hari terjadi pada bulan Maret dan Oktober dan rata-rata hari hujan di Kota Bengkulu pada tahun 2010 sebanyak 23 hari hujan.

4.1.2. Historis Kota Bengkulu

Secara historis Kota Bengkulu terbentuk berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupatenkabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan. Sejak dikeluarkannya UU No. 1 tahun 1957, Kota kecil Bengkulu diubah statusnya menjadi Kotapraja, meliputi 4 wilayah

kedudukan yang membawahi 28 Kepangkuan. Berdasarkan UU. No. 9 tahun 1967 Jo. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1988 Propinsi Bengkulu berdiri di Kota Bengkulu dijadikan sebagai Ibu Kota. Kemudian sebutan Kotapraja diganti dengan Kotamadya Dati II Bengkulu sesuai dengan UU. No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Istilah Kotamadya Dati II Bengkulu berubah menjadi Kota Bengkulu berdasarkan UU. No. 22 tahun 1999 tentang Pemerinthan Daerah.

Pada tahun 2003 Kota Bengkulu mengalami pemekaran wilayah, yang semula 4 kecamatan dengan 57 Kelurahan menjadi 9 kecamatan dan 67 kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 28 tahun 2003. Selanjutnya pada tahun 2011, Kota Bengkulu mengalami pemekaran kecamatan kembali, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 1. Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan Di Kota Bengkulu Pada Tahun 2011

No	Kecamatan	Luas Wilayah (HA)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Orang Tua Anak Jalanan
1.	Selebar	4.636	13	-
2.	Kampung Melayu	2.314	5	-
3.	Gading Cempaka	1.444	6	21
4.	Ratu Agung	1.102	7	-
5.	Ratu Samban	284	7	-
6.	Teluk Segara	276	9	1
7.	Sungai Serut	1.353	8	-
8.	Muara Bangkahulu	2.316	6	4
9.	Singaran Pati	1.442	6	8
TOTAL			67	34

Sumber : Kota Bengkulu Dalam Angka, 2011.

Berdasarkan tabel 1 di atas dan data anak jalanan menunjukkan bahwa rata-rata orang tua anak jalanan berdomosili di wilayah Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Singaranpati dan Muara Bangkahulu, ini dapat berarti bahwa aktivitas

yang mereka lakukan memiliki kedekatan jarak tempat tinggal anak-anak. Kemudahan menempuhnya ke lokasi aktivitas akan menjadi daya dorong bagi anak-anak, cepat sampai dan relatif aman .

4.1.3 Pemerintahan

Pemerintah Kota Bengkulu dipimpin oleh seorang Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih langsung melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2008. Pada tahun 2010 untuk pemilihan legeslatif telah terpilih 30 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari 22 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Untuk berjalannya roda Pemerintahan, Pemerintah Kota Bengkulu memiliki 108 unit kerja sebagaimana pada tabel 4 berikut :

Tabel 2. Persebaran Unit Kerja di Pemerintah Kota Bengkulu

No	Unit Kerja	Jumlah
1.	Sekretariat	3
2.	Badan	10
3.	Dians	15
4.	Kantor	4
6.	Kecamatan	9
7.	Kelurahan	67
TOTAL		108

Sumber :Bappeda Kota Bengkulu, 2011.

4.1.4 Penduduk

Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 oleh Badan Statistik yang dikenal dengan SP2010 menunjukkan bahwa penduduk Kota Bengkulu berjumlah 308.544 Jiwa, yang terdiri dari 155.372 jiwa laki-laki dan 153.384 jiwa perempuan. Sementara

jumlah rumah tangga tercatat sebesar 79.168 rumah tangga. Adapun sebaran penduduk menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bengkulu Tahun 2012

No	Kecamatan	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah
1.	Selebar	23.504	22.707	46.211
2.	Kampung Melayu	14.519	13.853	28.372
3.	Gading Cempaka	39.468	39.299	78.767
4.	Ratu Agung	24.742	24.513	49.255
5.	Ratu Samban	12.149	12.457	24.624
6.	Teluk Segara	11.714	12.284	23.998
7.	Sungai Serut	11.023	10.958	21.981
8.	Muara Bangkahulu	18.169	17.167	35.336
9	Singaran Pati	-	-	-
	TOTAL	155.288	153.256	308.544

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka, 2012.

Laju pertumbuhan penduduk berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2012 sebesar 2,9 % per tahun, laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan Selebar sebesar 11,03 % dan terendah di kecamatan Teluk Segara sebesar 0,08%. Tingkat kepadatan penduduk Kota Bengkulu pada tahun 2010 dengan luas wilayah 151.7 KM2 adalah 2.033 jiwa per KM2. Angka ini mengalami kenaikan 10,6 % di banding tahun 2009, dimana tingkat kepadatan penduduk Kota Bengkulu tahun tersebut adalah 1,838 jiwa. Dilihat penyebarannya dari 9 Kecamatan di wilayah Kota Bengkulu, penduduk yang lebih banyak tinggal di kecamatan Gading Cempaka yaitu sebanyak 78.767 jiwa (25,5%), disusul kecamatan Ratu Agung 49.255 jiwa (16,0%). Kedua kecamatan ini merupakan pusat Pemerintahan dan ekonomi Kota Bengkulu.

4.1.5 Pendidikan dan Sosial

Berdasarkan data tahun 2012 banyak jenis pendidikan negeri dan swasta menurut tingkat pendidikan adalah, Taman Kanak-kanak sebanyak 86, Sekolah Dasar sebanyak 104, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebanyak 51, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebanyak 28, Sekolah Lanjutan Tingkat Kejuruan 20 dan Perguruan Tinggi sebanyak 11. (Diknas Kota Bengkulu : 2012).

Fasilitas Kesehatan berupa Puskesmas sampai tahun 2010 berjumlah sebanyak 19, Puskesmas Pembantu sebanyak 53, Puskesmas Keliling sebanyak 19, Klinik KB sebanyak 63, Rumah Bersalin sebanyak 20, Poyandu sebanyak 192, Poskesdes sebanyak 67. (Dinas Kesehatan Kota : 2012). Dalam tahapan keluarga sejahtera di Kota Bengkulu tahun 2011 – 2012 tidak sedikit pun mengalami peningkatan yakni dalam angka Pra Sejahtera : 1.775, Sejahtera I : 10.658, Sejahtera II : 22.465, Sejahtera III : 19.169 dan Sejahtera Plus : 3.967. Selanjutnya data umat beragama di Kota Bengkulu sampai tahun 2012 adalah ; Islam : 278.031, Katholik : 4.617, Protestan : 13.813, Hindu : 521 dan Budha : 1.602 . (Depag Kota Bengkulu : 20102).

Dari data penganut agama penduduk Kota Bengkulu mayoritas menganut Islam. Mengingat telah merebaknya angka anak jalanan di Kota Bengkulu, sudah sepantasnya partisipasi dan peran tokoh agama sangat penting dalam mengentaskan anak jalanan. Sesungguhnya ajaran Islam memiliki konsep pembinaan keluarga. Islam juga mengajarkan betapa besar tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak. Maka kalau anak-anak disibukkan dengan pendidikan maka secara otomatis mereka tidak akan turun ke jalan.

Tentang pandangan Islam terhadap perilaku anak jalanan adalah bahwa sesungguhnya setiap orang itu mulia dan baik, kecuali jika dia telah berperilaku tidak baik. Maka selama mereka berperilaku baik tidak mencuri, tidak kriminal, tidak mencuri, tidak berkata kotor, mengelem maka mereka tetap baik di mata agama. Dari kondisi inilah pelibatan tokoh agama dalam rangka pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kegiatan penyuluhan dan pengajian perlu digalakkan. Misal penyaluran dan pemanfaatan dana-dana zakatzakat mall yang sesuai dengan peruntukan dan sesuai sasaran akan menjadi modal dan kekuatan membangun ekonomi masyarakat miskin di Kota Bengkulu.

4.1.6 Visi dan Misi Kota Bengkulu

Visi dan Misi Kota Bengkulu seperti yang tertera di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bengkulu tahun 2008 – 2013 adalah menuju masyarakat Kota Bengkulu yang bermartabat dan makmur. Visi tersebut memiliki makna bahwa selama lima tahun ke depan merupakan tahap pertama pembangunan jangka panjang, yang memiliki dua kunci pokok yakni masyarakat bermartabat yang mengandung arti bahwa masyarakat Kota Bengkulu mempunyai harga diri dan martabat yang tinggi dengan dasar meyakini akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupannya dalam wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kata kunci kedua adalah Kota yang makmur merupakan kondisi kehidupan masyarakat Kota Bengkulu yang sejahtera dan berkecukupan jasmani dan rohani. Kondisi Kota yang makmur akan tercapai melalui penguatan perekonomian rakyat dan bertumpu pada kekuatan lokal dan berwawasan

lingkungan yang berkelanjutan serta dukungan sarana prasarana yang cukup memadai guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dijabarkan ke dalam 7 dasar pembangunan kota yang salah satunya adalah “ *Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan serta menciptakan lapangan pekerjaan demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang makmur* “. Untuk terwujudnya visi dan misi tersebut, Pemerintah Kota Bengkulu mempunyai strategi utama yang disebut 3 Pilar yaitu , *Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Kerakyatan*. Melihat visi dan misi dan strategi utama yang diemban Pemerintah Kota Bengkulu, sungguh merupakan kemuliaan hak dan kewajiban Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan warganya. Namun dalam sisi lain terhadap masalah anak jalanan dan aksesnya masih didapatkan kenyataan yang tidak mencerminkan, mulai dari adanya usia anak-anak yang putus dari bangku pendidikan, adanya perilaku anak-anak ngelem, orang tua anak jalanan yang miskin dan rumahnya tidak layak huni. Itu adalah sebagian fenomena sosial yang masih menjadi renungan dan agenda besar untuk ditindaklanjuti.

4.1.7 Dinas Sosial Kota Bengkulu

Dinas Sosial Kota Bengkulu merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah selain mengemban visi dan misi Pemerintah Kota , maka juga melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial.

Pembentukan Dinas Sosial Kota Bengkulu didasari atas :

1. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 09 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Dearah Kota Bengkulu.

Dalam melaksnakan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Sosial Kota Bengkulu dijabarkan dalam Peraturan Walikota Bengkulu No. 26 Tahun 2008 tanggal, 16 Desember 2008 tentang uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu, yang terdiri dari : Kepala Dinas , Sekretariat, Bidang Perencanaan, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Bantuan Sosial, Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam penanganan anak jalanan maka Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan rehabilitasi penyandang cacat dan lanjut usia, pembinaan bagi tuna sosial (gelandangan dan pengemis, Wanita Tuna Susila, Waria, penyandang psikotik/ gangguan jiwa), anak terlantar, anak nakal dan korban narkoba dan pengangkatan anak. Maka dalam melaksanakan bidang tersebut bidang rehabilitasi sosial mempunyai fungsi (pasal 13) point : yakni melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi sosial anak nakal, anak terlantar dan korban narkotik, penyusunan rencana / program kegiatan bidang rehabilitasi sosial. Maka dalam tugas pokok dan fungsi penanganan masalah anak jalanan dilaksanakan oleh Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Narkoba, diantaranya :

1. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas seksi rehabilitasi sosial anak nakal dan korban narkoba.
2. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknik rehabilitasi terhadap anak nakal, anak terlantar dan korban narkoba dan pengangkatan anak.
3. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap anak nakal dan anak terlantar.
4. Melaksanakan pembinaan dan bantuan modal usaha ekonomi produktif terhadap anak nakal dan korban narkoba.

Melihat tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota tersebut berarti bahwa penanganan anak jalanan masuk pada Bidang Rehabilitasi Sosial tepatnya di Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Narkoba. Alasan-alasan klasik baik tidak tersedianya anggaran dan kurang sumber daya manusia ternyata masih merupakan senjata yang kuat agar masalah anak jalanan kurang mendapatkan porsi penanganan. Data-data anak jalanan dan seluruh fenomena dan akses yang ditimbulkan tidak menjadikan target perhatian Pemerintah Kota Bengkulu dan berbagai Lembaga Peduli. Maka tidak dapat dipungkiri masalah anak jalanan berpotensi selalu meningkat.

Secara ideal permasalahan anak jalanan menjadi kewenangan Dinas Sosial Kota Bengkulu, akan tetapi sampai saat ini tindakan yang dilakukan masih sangat terbatas. Hal ini tercermin dalam hasil wawancara yang dilaksanakan kepada Kabid Rehabilitasi Sosial “ LS “, bahwa tindakan yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Bengkulu adalah :

1. Penegakan Perda Ketertiban Umum di Kota Bengkulu, sehingga diadakan razia gabungan dalam rangka penangkapan kepada gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kota Bengkulu.
2. Setelah penangkapan maka dilakukan registrasi / pendataan dan pembinaan, selanjutnya dikembalikan kepada keluarganya.
3. Himbuan tertulis melalui selebaran agar tidak melakukan aktivitas di jalanan dan mengganggu ketertiban umum yang ditujukan kepada gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
4. Dana dekonsentrasi yakni berupa alokasi dari APBN melalui Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Bengkulu yang berupa paket bantuan stimulan bagi anak jalanan.

Dari gambaran di tersebut di atas ditambahkan juga oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi 1 “SJ” menyatakan bahwa anak jalanan sudah mulai terasa eksisnya, kami menyadari belum ada program yang mengarah kepada penanganan secara serius berupa payung hukum (PERDA), tetapi selama ini baru sebatas preventive dan penegakan ketertiban umum .(wawancara, 5-92012).

4.2 Tindakan Pemerintah Kota Bengkulu dan Fenomena Anak Jalanan

Upaya konkrit berupa program-program bermunculan adalah merupakan tindakan nyata Pemerintah dalam menjawab penanganan anak jalanan. Program Kesejahteraan Sosial Anak adalah salah satu program di Kemeterian Sosial R.I. khususnya di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang pada tahun 2011 ini diperkuat dengan Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial No. 29/RS-

KSA/KEP/2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Pedoman Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang didalamnya termasuk kluster/ sub program bagi Anak Jalanan. Program Kesejahteraan Sosial Anak (termasuk anak jalanan) adalah merupakan upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar anak, yang meliputi bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial dasar, peningkatan kemampuan potensi diri dan kreativitas anak, penguatan orang tua/ keluarga dan penguatan lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (2011:10).

1. Pembinaan dan Pelayanan berbasis masyarakat.

Penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh masyarakat, kelompok sosial, kelompok keagamaan, kelompok remaja dan kelompok lainnya dalam kerangka program pelayanan yang telah disusun bersama pekerja sosial, masyarakat dan stakeholders. Maka posisi keluarga dan masyarakat adalah sebagai bagian upaya pelayanan kepada anak jalanan memberikan peluang yang luas kepada lingkungan untuk memecahkan masalah yang dihadapi anak.

2. Rumah Perlindungan “ *Trauma Centre* “.

Adalah rumah lembaga layanan terhadap korban tindak kekerasan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Program ini telah lama berjalan sejak tahun 2004, sampai saat ini di Dinas Sosial Kota Bengkulu tetap berjalan. Di *Trauma Centre* korban akan mendapatkan pelayanan, perlindungan dan pendampingan baik secara psikologis, rohani, fisik dan hukum bagi yang membutuhkan

3. Bentuk Pelayanan di Jalanan (*street based*).

Merupakan bentuk layanan dimana anak jalanan dijangkau dan dilakukan pendampingan di jalanan dalam rangka mengenal, mendampingi, melakukan relasi dan komunikasi, serta melakukan penanganan di jalanan seperti konseling, diskusi, melakukan permainan, pemberian informasi. Tujuan pelayanan ini adalah pekerja sosial/ petugas memberikan wawasan positif dalam rangka menangkal pengaruh negative di jalanan (2006 : 34-35). Sebagai contoh adalah Mobil Sahabat Anak (MSA).

4. Pelayanan Kelembagaan (*Institusional based*).

Merupakan bentuk pelayanan dimana anak jalanan sebagai penerima pelayanan ditempatkan pada pusat kegiatan dan tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu. Selama berada di pusat kegiatan anak jalanan akan dapat pelayanan sampai mencapai tujuan yang diinginkan. (2006 : 35). Sebagai contoh adalah model rumah singgah atau dikenal juga *Open House* yang telah berjalan di beberapa Negara dan telah diadopsi di Indonesia dan sampai ke Provinsi.

5. Pelayanan Keluarga dan Masyarakat (*family and community based*).

Bentuk pelayanan yang melibatkan keluarga dan masyarakat yang bertujuan mencegah anak – anak turun ke jalanan untuk mencari uang dan mendorong penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan anak. Keluarga dan masyarakat diarahkan untuk sadar, berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam mengatasi anak jalanan. (2006 : 35). Contoh adalah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Kemudian ada mobil sahabat anak, mobil sahabat anak adalah suatu model

penjangkauan dan pendampingan dalam mengatasi masalah anak jalanan dalam bentuk *street based* karena mendatangi anak jalanan di tempat dimana mereka sering berkempul. Mobil Sahabat Anak dilengkapi model rumah singgah yang juga saat ini telah dikembangkan oleh Depsos R.I, beberapa tahun lalu dan sebagian Daerah telah mengadopsinya. Mobil Sahabat Anak menjangkau anak-anak jalanan yang tidak/ belum terjangkau atau menolak ke rumah singgah. Mobil Sahabat Anak juga memelihara dan menguatkan sikap dan perilaku anak jalanan binaan rumah singgah yang masih berada dan bekerja di jalanan. Selain itu juga dilakukan pendampingan dengan memberikan pendidikan (*street educati*

6. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA Depsos R.I. : 2009).

Rumah Perlindungan Sosial Anak adalah lembaga yang memberikan perlindungan sementara kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus, dan dalam bentuk :

- a. *Temporary Shelter*, yaitu unit pelayanan perlindungan pertama yang bersifat responsive dan segera bagi anak yang mengalami tindak kekerasan dan perlakuan salah, atau yang memerlukan perlindungan khusus.
- b. *Protection Home*, yaitu unit pelayanan perlindungan lanjutan dari *Temporary Shelter* yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus sehingga anak dapat tumbuh kembang secara wajar . Depsos R.I (2009).

Fenomena merebaknya anak jalanan di Kota Bengkulu merupakan permasalahan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan bukanlah pilihan yang menyenangkan, karena mereka dalam kondisi masa depan yang tidak jelas dan bukanlah jalan terakhir yang harus ditempuh. Keberadaan mereka tidak jarang menjadi “ masalah “ banyak orang, keluarga, masyarakat dan Daerah. Namun perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar dan solutif. Razia terpadu yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bengkulu belum mampu memberikan solusi yang tepat (Rakyat Bengkulu, 30 Nopember 2011). Sungguh kondisi mereka sangat memprihatinkan bahkan tidak menutup kemungkinan dapat menjadi *lost generation* (genarasi yang hilang). Padahal mereka adalah merupakan asset, investasi sumberdaya manusia dan sekaligus tumpuan masa depan bangsa dan negara yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya sehingga tumbuh kembang menjadi manusia dewasa bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah.

Kita akan selalu melihat fenomena anak jalanan terutama di persimpangan jalan raya kawasan Jl. Suprpto, Simpang. S. Parman, Simpang Padang Harapan dan di Pasar tradisional Panorama dan Pasar Minggu. Pemandangan ini akan lebih terasa ketika pada hari Minggu dan libur sekolah, sehingga aktivitas yang mereka lakukan akan lebih terlihat jelas. Kisah seorang anak harus berjualan kantong plastik di Pasar Tradisional Modern Bengkulu (Berita Sore TVRI Bengkulu, 19 November 2011). Hal tersebut merupakan bukti bahwa anak jalanan memiliki akar masalah yang kompleks.

Permasalahan anak jalanan tidaklah cukup dibahas dan dijadikan topik seminar akan tetapi harus segera mengambil langkah konkrit mengingat keberadaan mereka justru semakin hari semakin bertambah, mulai dari perempatan jalan, di pasar-pasar tradisional, emper-emper toko, aktivitas mereka ada yang berjualan barang dan mengemis, menyemir sepatu dan jual jasa. Dilihat dari tingkat resiko yang dihadapi anak jalanan memiliki resiko terlalu besar. Dengan kurangnya kedewasaan akibat faktor pendidikan, umur dan pengetahuan maka bukan tidak mungkin resiko dapat menimpa mereka, terjadinya kecelakaan, eksploitasi, kekerasan, kriminalitas, pelecehan seksual dan tindakan-tindakan lain yang dapat menimpa mereka.

Hasil riset yang dilakukan oleh Yayasan Nanda terhadap anak jalanan di Area Simpang Dago Bandung (2010) bahwa kehadiran anak jalanan merupakan sesuatu yang dilematis. Di satu sisi mereka dapat mencari nafkah dan mendapatkan pendapatan (*income*) yang membuat bertahan hidup dan menopang keluarganya. Namun disisi lain kadang mereka juga berbuat halhal yang merugikan orang lain, misal berkata kotor, mengganggu ketertiban di jalan, merusak body mobil dengan goresan dan lain-lain. Selain itu permasalahan anak jalanan adalah menjadi obyek kekerasan, mereka merupakan kelompok sosial yang sangat rentan dari berbagai tindak kekerasan fisik, emosi, seksual dan kekerasan sosial. Banyaknya data anak jalanan di Kota Bengkulu setidaknya menjadi cermin kondisi kesejahteraan suatu daerah.

Yayasan Ceria Kota Bengkulu adalah Lembaga Sosial Masyarakat yang beralamat di Belimbing 3 RT. 24 RW.08 No.28 Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Yayasan ini telah berdiri sejak tahun 2008 dan telah memulai konsen pada masalah anak tahun 2009. Lembaga sosial tersebut diketuai Bapak Nurdin, S,Sos. yang saat ini menjadi mitra Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu. Dari hasil wawancara dan observasi dapat diperoleh gambaran bahwa penanganan yang dilakukan lembaga ini sejak berdiri adalah dengan melakukan pendataan, dan pendampingan. Dari data dan pendampingan yang dilakukan maka pada tahun 2010 dan sampai 2012 ini Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu melalui Dinas Sosial Kota Bengkulu mengalokasikan anggaran stimulan bagi sebagian anak jalanan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas data hasil penelitian, terlebih dahulu peneliti akan mengemukakan identitas-identitas responden pada penelitian ini. Dalam penelitian yang berjudul Analisis Kebijakan Penanganan Anak Jalanan di Kota Bengkulu ini informan yang diambil sebanyak 5 orang yang terdiri dari 3 Anak jalanan yang berada di simpang lima Suprpto Kota Bengkulu yang selanjutnya disebut sebagai informan *pangkal* dan 2 Orang Pegawai Dinas Sosial Kota Bengkulu yang selanjutnya disebut sebagai informan *pokok*.

5.1 Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan

Ketika kondisi kelangsungan hidup keluarga terancam oleh minimnya sumberdaya ekonomi yang dihasilkan kepala keluarga, maka seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak akan dikerahkan untuk bekerja demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam aktivitas ini jerih payah yang didapat anak akan dikontribusikan ke dalam pendapatan keluarga atau minimal dapat memenuhi kebutuhan sendiri bagi anak. Sebagian besar perilaku anak jalanan di Kota Bengkulu adalah bukti fenomena sosial yang sangat kompleks. Yang menjadi contoh bahwa permasalahan itu berakar dari latar belakang kemiskinan atau keterbatasan ekonomi dan keluarga tidak mampu. Mengingat pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga tidak mampu tercukupi.

Latar belakang ini tercermin dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden anak jalanan, bahwa mereka rata-rata masih tinggal bersama orang tua dan mata pencahariannya tidak tetap. Konsekuensi ini akhirnya memberikan peluang kepada anak-anaknya untuk bekerja di luar dan bahkan menjadi anak putus sekolah. Ditambah lagi faktor penarik dan pendorong yang tersedia untuk menghasilkan uang sangat mudah diakses mereka. Seperti kedekatan rumahnya dengan pasar, jalan raya dan mall. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial tahun 2009 membuktikan bahwa tipologi keluarga anak jalanan adalah sebagai berikut : 1). Sebagian besar berusia produktif, 2). Berpendidikan rata-rata sekolah dasar, 3). Sebagian besar berprofesi sebagai buruh harian, 4). Memiliki 1-2 orang anak yang bekerja di jalan, 5). Sebagian besar tidak mendukung anaknya bekerja di jalan, 6). Mendukung anak untuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, 7). Hanya sedikit keluarga yang pernah memperoleh program pemberdayaan keluarga, 8). Sebagian besar mempunyai rumah berstatus menyewa, 9). Pekerjaan mereka tidak tetap, 10). Mempunyai frekuensi yang tinggi untuk bertemu dengan anak. Akibat kondisi keluarga demikian dapat berarti bahwa anak jalanan merupakan produk kemiskinan keluarga.

Desakan ekonomi dan kebutuhan keluarga menjadikan anak-anak sebagai pencari uang yang menopang kebutuhan keluarga minimal untuk kebutuhan sendiri. Sejalan dengan hal tersebut Direktur Pelayanan Sosial Anak Departemen Sosial R.I. (2006) menyatakan “ bahwa fenomena anak jalanan kalau ditelusuri secara mendalam ada penyebab yang mendasar yakni sebagai akibat problema sosial ekonomi yang didominasi oleh masalah kemiskinan sehingga orang tuanya atau keluarga yang

tergolong tidak mampu untuk menyediakan kebutuhan dasar anak termasuk kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan secara layak “.

Tindakan Pemerintah terhadap anak jalanan di Kota Bengkulu dapat terlihat dari hasil wawancara dan observasi kepada pelaksana selaku pejabat yang membidangi penanganan anak jalanan adalah sebagai berikut :

“ Informan Ibu. LS menyatakan” melihat Tupoksi Dinas Sosial, secara implisit bahwa permasalahan gepeng, anjal, anak nakal, dll menjadi sasaran garapan di Instansi kami, akan tetapi sampai sekarang ini tidak pernah tersedia anggaran untuk penanganan masalah tersebut. Oleh karena itu kami sebatas sosialisasi berupa himbuan dan edaran yakni upaya penegakan Perda tentang Ketertiban Umum.

Kemudian salah satu informan berinisial HM mengatakan bahwa:

“ Data anak jalanan ada di pendamping karena ketika dari Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Bengkulu ada program dan kegiatan maka pendamping yang ikut membantu proses pendataanya.

Selanjutnya informan berinisial SR dan dibantu HN, mengatakan bahwa :

“ Tindakan terhadap anak jalanan sebetulnya sudah lama, tetapi sekarang menjadi program yang luas dan menyatu dikenal dengan Program Kesejahteraan Sosial Anak atau istilah di Kementerian Sosial R.I. “ Program Kesejahteraan Sosial Anak” sejak tahun 2009. Dimana PKSA ini memiliki 6 kluster yang salah satunya adalah program kesejahteraan sosial anak jalanan. Untuk kita di Propinsi Bengkulu permasalahan anak jalanan memang sudah mulai merebak, fenomena ini bisa di lihat di simpang jalan dan di pasar-pasar tradisional dalam wilayah Kota Bengkulu. Tindakan yang dilakukan ya... sebatas bantuan stimulan bagi anak-anak. Ini dilaksanakan sejak tahun 2010 sampai sekarang, tahun 2010 yang telah dibantu 50 orang, tahun 2011 sebanyak 100 orang dan rencananya tahun ini 100 orang. (wawancara, 27 Agustus 2012). Mengingat penyebab anak jalanan mempunyai akar masalah yang kompleks, maka diperlukan strategi bersama dan sinergi dalam penanganannya bersama pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.”

Dari wawancara tersebut tergambar bahwa tindakan anak jalanan secara nasional sejak tahun 2009 telah berjalan, namun alokasi di Kota Bengkulu sangat terbatas. Dari data yang ada tahun 2006 berjumlah 435 orang dan baru 100 orang yang bisa dibantu, ini berarti baru 22% yang bisa tertangani.

Sementara waktu pada tahun 2012 ini Pemerintah Provinsi dan Kota Bengkulu belum 100% melakukan penanganan terhadap anak jalanan baik formal yang dapat berupa produk kebijakan (Perda) dan program-program bagi penanganan anak jalanan. Kunjungan yang sudah dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Bengkulu pada tanggal 4 Agustus 2011 ke DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka menggali informasi dan study banding terkait Perda Perlindungan Anak yang hidup di jalan belum juga mampu membuahkan hasil (RB, 15 Agustus 2011). Begitu halnya penanganan dan tindakan anak jalanan di Kota Bengkulu belum ada aturan formal yang menjamin terhadap perlindungan anak yang hidup di jalan. Sebagaimana tujuan yang tercermin dengan Perda di Kota Bengkulu tentang perlindungan anak yang hidup di jalan bertujuan mengentaskan anak yang hidup di jalan, menjamin pemenuhan kebutuhan hak-hak anak agar hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta agar mereka mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan juga kekerasan. (Nuryadi, RB : 15 Agustus 2011).

Belum adanya aturan formal dan program-program dalam rangka perlindungan anak jalanan ini berarti perlindungan dan penanganan anak jalanan di Kota Bengkulu masih jauh. Belum adanya aturan dan program penanganan anak jalanan menjadikan aktivitas anak jalanan tidak tertangani dengan baik dan selalu

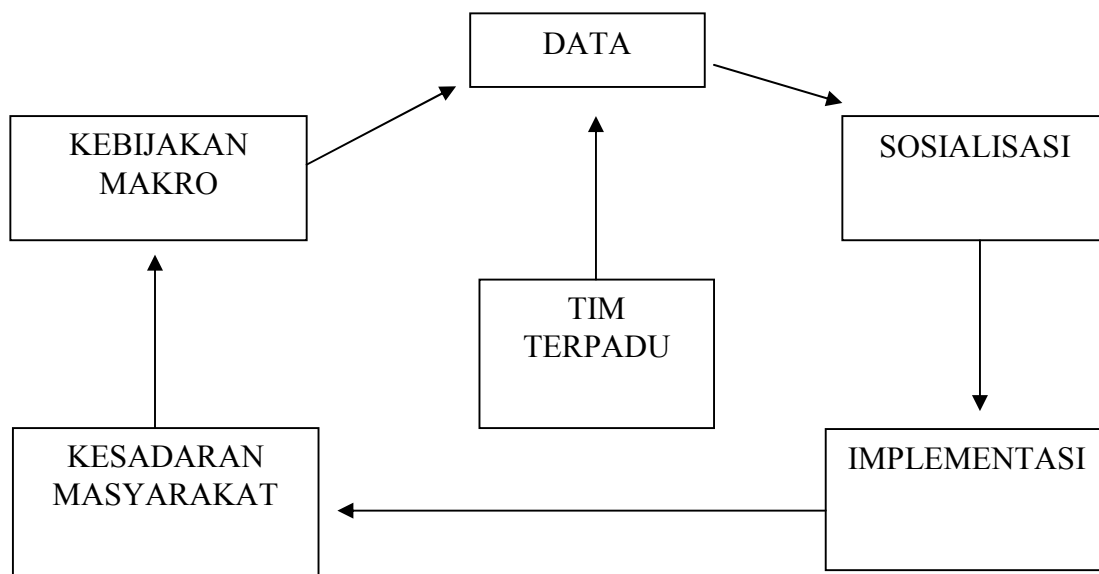
bertambah. Mereka akan leluasa beraktivitas, sementara persepsi masyarakat masih kurang terhadap anak jalanan itu sendiri, sehingga rasa iba dan belas kasihan mereka masih memberikan uang. Mereka menganggap dengan memberikan uang di jalan seolah-olah membantu, padahal secara tidak langsung telah memanjakan dan membuka peluang untuk tetap beraktivitas di jalan. Sebagai contoh, polisi tidak akan berani mengambil tindakan pada perilaku anak jalanan karena belum memiliki dasar hukum yang kuat padahal tugas mereka adalah menjaga ketertiban lalu lintas. Maka jika ada koordinasi yang baik dengan kepolisian dari sisi ketertiban lalu lintas seharusnya di jalan tidak ada bertebaran anak jalanan. Lahirnya kebijakan berupa aturan-aturan formal Peraturan Daerah dimungkinkan akan menjadi dasar hukum berpijak bahwa penanganan terhadap anak jalanan akan dapat dibina secara terencana, terukur, masyarakat akan dapat menyalurkan bantuan kepada lembaga-lembaga yang sesuai dan resmi sehingga lebih terkontrol .

Sebelum adanya kebijakan berupa aturan formal maka seharusnya Pemerintah Daerah Kota Bengkulu segera duduk bersama mengambil langkah secara nyata terhadap penanganan anak jalanan. Karena pada dasarnya memahami masalah anak jalanan dan resiko yang dihadapi mereka di jalan menguatkan semangat berpikir dan komitmen kita bersama bahwa anak-anak harus segera mungkin dikeluarkan dari aktivitas jalanan. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 74 menyebutkan “ siapa pun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk “. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 2 menyatakan : “ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan

berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Melihat kondisi permasalahan anak jalanan di Kota Bengkulu dengan hasil-hasil riset terdahulu yang telah dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (LP2KS) Provinsi Bengkulu, maka setidaknya ada beberapa tindakan dan strategi yang dapat dilakukan secara skematis oleh Pemerintah Kota Bengkulu diantaranya sebagai berikut :

Gambar 1. Bagan Strategi Penanganan Anak Jalanan di Kota Bengkulu



Sumber: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (LP2KS) Provinsi Bengkulu, 2011.

1. Tim Terpadu

Tim koordinatif yang dibentuk bersama oleh Pemerintah Daerah yang beranggotakan lintas lembaga dan lintas program yang bertujuan pada tindakan anak jalanan dan keluarga.

2. Data

Berupa informasi lengkap tentang keluarga dan anak jalanan berupa data base anak jalanan Kota Bengkulu “ mapping “

3. Sosialisasi

Kegiatan pengenalan, penyebaran informasi tentang anak jalanan dan penyiapan pelaksanaan program/ tindakan .

4. Implementasi

Berupa tahapan pelaksanaan tindakan anak jalanan yang didasari atas data base anak jalanan dan keluarga .

5. Kebijakan Makro

Berupa aturan formal yang berupa Peraturan Daerah yang dilahirkan atas masukan berbagai pihak baik akademisi, praktisi, masyarakat dan anak jalanan sendiri.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa maraknya anak jalanan di Kota Bengkulu disebabkan masih kurangnya tindakan Pemerintah terhadap anak jalanan. Tindakan anak jalanan yang ada belum dapat memberikan solusi bagi anak untuk keluar dari jalanan.

Kesimpulan dari masih banyaknya anak jalanan yang ada di Kota Bengkulu dapat dilihat dari beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Anak jalanan

- Rendahnya pemahaman resiko saat berada di jalan
- Pengaruh lingkungan, teman bergaul, mereka ada yang ikutikutan
- Kecenderungan putus sekolah, merasa mudah memperoleh uang daripada sekolah

b. Keluarga

- Pendidikan rata-rata sekolah dasar
- Tingkat keterampilan/ pengetahuan yang kurang/ terbatas
- Rumah rata-rata menyewa
- Pekerjaan yang tidak tetap
- Keluarganya kurang mampu

2. Faktor Eksternal

- a. Belum ada tindakan Pemerintah yang nyata dalam penanganan anak jalanan
- b. Belum ada kebijakan berupa aturan formal “ Peraturan Daerah “ tentang perlindungan anak jalanan.
- c. Kurangnya Organisasi Sosial dan Relawan Sosial yang peduli penanganan anak jalanan
- d. Kurangnya penguatan program pemberdayaan bagi keluarga anak jalanan
Kurangnya pemahaman masyarakat akan masalah anak jalanan.

6.2 Saran

Mengingat pesatnya perkembangan anak jalanan di Kota Bengkulu, maka sudah seharusnya Pemerintah dengan semua pihak secara bersama segera mengambil langkah nyata tindakan anak jalanan, antara lain :

1. Bahwa tindakan anak jalanan tidak cenderung dititik beratkan pada upaya pemberdayaan langsung kepada anak, melainkan intervensi juga terhadap keluarga atau orang tua anak jalanan mengingat latar belakang keluarga mereka adalah miskin. Sehingga dipandang perlu untuk mendapat bantuan pemberdayaan keluarganya.
2. Pemerintah dan Instansi terkait harus segera memiliki data base anak jalanan, untuk dapat menjadi data dan informasi guna kepentingan perencanaan dan tindakan bagi yang berkepentingan.

3. Pemerintah Daerah segera memfasilitasi terbentuknya Tim Terpadu, instansi terkait dan pihak-pihak peduli untuk menyelesaikan persoalan anak jalanan secara bersama-sama, sehingga tindakan yang dilakukan akan mempunyai dimensi yang luas, baik aspek sosial, agama, pendidikan, ekonomi, hukum dan keamanan.
4. Organisasi Sosial dan Pendamping/ Relawan Sosial untuk lebih ditingkatkan kepedulianya terhadap upaya-upaya pendampingan yang dilakukan, mengingat ancaman resiko anak jalanan terlalu besar yang harus mereka hadapi, seperti kriminalitas, seksualitas, eksploitasi, kekerasan, penyalahgunaan obat terlarang, dan lain-lain.
5. Pemerintah Daerah segera lebih lanjut mengkaji lahirnya Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Penanganan Anak Jalanan dengan pelibatan semua pihak, dari akedemisi, masyarakat, politisi, aktivis dan anak jalanan itu sendiri.
6. Masyarakat untuk segera merubah prilaku selama ini untuk tidak memberikan uang kepada anak jalanan. Akan lebih baik masyarakat menyalurkan melalui lembaga resmi milik Pemerintah atau lembaga resmi yang menangani anak jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariati, Sri, 2010, Analisis Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
Dalam Mendukung Pembangunan Kesejahteraan Sosial,
Balibang Kesos, 2009, Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, Depsos. R.I. Jakarta.
_____, 2011, Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kemensos R.I Jakarta.
Badan Stantistik, “ Bengkulu Dalam Angka , 2012.
BAPPEDA Kota Bengkulu , “ Bengkulu Dalam Angka , 2012
BAPPEDA Kota Bengkulu , “ Unit Kerja Pemerintah , 2011
Diknas Kota Bengkulu,2012, Tingkat Pendidikan
Dirjen Yanrehsos, 2004, Pedoman Penanganan Anak Yang Memerlukan
Perlindungan Khsusus , Depsos R.I. Jakarta.
_____, 2008, Pedoman dan Rehabilitasi Sosial Anak Cacat, Depsos R.I.
Jakarta.
_____, 2008, Pedoman Pelayanan Anak Terlantar, Depsos R.I. Jakarta.
_____, 2008, Standar Pelayanan Sosial Panti Sosial Bina Remaja, Depsos
R.I. Jakarta.
Direktorat Pelayanan Sosial Anak, 2007, Pedoman Penyelenggaraan Rumah
Perlindungan Sosial Anak, Depsos R.I.
_____, 2001, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat dalam
Penanganan Anak Jalanan Berbasis Masyarakat, Depsos R.I. Jakarta.
Dirjend Bina Kesejahteraan Sosial, 1998, Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan
Anak Jalanan Melalui Mobil Sahabat Anak. Despsos R.I.

Direktorat Rehabilitasi Sosial, 2010, Keputusan Mensos R.I. No. 15.A/HUK/2010 tentang Pedoman Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak, Kemensos R.I. Jakarta

_____, 2011, Pedoman Operasional PKSA , Depsos R.I. Jakarta. Dinkesos, 2009, Data PMKS dan PSKS, Bengkulu.

_____, 2010, Data PMKS dan PSKS, Bengkulu

_____, 2011, Data PMKS dan PSKS, Bengkulu

Harian Bengkulu Ekspres, 5 Agustus 2011

Harian Rakyat Bengkulu, 30 November 2011

Harian Rakyat Bengkulu, 15 Agustus 2012

Indiahono, Dwiyanto, 2009, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy

Analisis, Gava Media Yogyakarta

Kemensos R.I., Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial.

LP2KS, 2008, Profil Anak Jalanan di Propinsi Bengkulu, Bengkulu.

Puspensos, 2009, Pedoman Penyuluhan Sosial, Depsos R.I. Jakarta

Suharto, Edi, 2006, Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji masalah dan Kebijakan Sosial, CV. Alfabeta Bandung.

_____, 2007, Konsep dan Strategi Peengentasan Kemiskinan Menurut perspektif Pekerjaan Sosial, STKS, Bandung. diakses dari <http://www.depsos.go.id> tanggal 28 Januari 2011.

Sekjend Depsos R.I., 2008, Pedoman Analisis Kebijakan , Depsos R.I. Jakarta.

Tabloid Wanita Indonesia Edisi 1047 tanggal 18 Januari 2010.

TVRI Bengkulu, Berita Sore tanggal, 15 November 2011.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN

Petunjuk :

Pedoman wawancara pada penelitian yang berjudul “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Dalam Penanganan Anak Jalanan ini terdiri atas dua bagian. Pada tiap bagian berisi pernyataan, mohon dijawab dengan sebenar-benarnya dan tidak terdapat pertanyaan yang belum dijawab atau terlewatkan.

A. IDENTITAS INFORMAN

1. Nama :
2. Pendidikan Terakhir :
3. Jabatan :
4. Masa Kerja :
5. Pangkat/Golongan :
6. Jenis Kelamin :
7. Tempat dan Tanggal Wawancara :

B. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN ANAK JALANAN

1. Apakah sebelum pelaksanaan Penanganan anak jalanan ini dilakukan sosialisasi terlebih dahulu ?
2. Dalam kegiatan tersebut menurut Saudara bagaimana respon yang ada ?
3. Menurut Saudara apakah SDM yang mendukung program ini mampu dan memadai dalam mendukung program ?
4. Sampai saat ini bersumber dari manakah alokasi anggaran tersebut ?
5. Apakah dana APBD tersedia dalam penanganan anak jalanan tersebut ?
6. Dari Penanganan Anak jalanan tersebut mohon Saudara jelaskan tentang bentuk-bentuk program yang ada ?
7. Kalau memang penanganan anak jalanan menjadi salah satu garapan penanganan, mohon jelaskan sasaran dan bentuk-bentuk penanganan anak jalanan tersebut ?.
8. Apakah dalam pelaksanaan Penanganan anak jalanan selama ini telah mengacu kepada JUKLAK dan JUKNIS yang ada ?
9. Bagaimanakah mekanisme untuk memperoleh data tentang anak jalanan tersebut?
10. Menurut Saudara, apakah program yang dilakukan selama ini telah memberikan kontribusi yang positif bagi anak jalanan ?

**DOKUMENTASI
HASIL PENELITIAN**

GAMBAR 1

WAWANCARA DI KANTOR DINAS SOSIAL



Wawancara dan pengambilan data



Wawancara dengan Pegawai Dinas Sosial



Wawancara dengan Pegawai Dinas Sosial



GAMBAR 2

DINAS SOSIAL MELAKUKAN RAZIA



ANAK JALANAN DI DEPAN KANTOR WALIKOTA



AKTIVITAS ANAK JALANAN DI WAKTU ISTIRAHAT



Anak Jalanan di Depan Kantor Walikota

